

**PENGARUH PENDIDIKAN ANTIKORUPSI TERHADAP PENGUATAN
CIVIC DISPOSITION PESERTA DIDIK DI
SMK NEGERI 1 BANDAR LAMPUNG**

(Skripsi)

Oleh

MUHAMMAD JULIANTO



**PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

ABSTRAK

PENGARUH PENDIDIKAN ANTIKORUPSI TERHADAP PENGUATAN *CIVIC DISPOSITION* PESERTA DIDIK DI SMK NEGERI 1 BANDAR LAMPUNG

Oleh

MUHAMMAD JULIANTO

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pendidikan antikorupsi terhadap penguatan *civic disposition* peserta didik di SMK Negeri 1 Bandar Lampung. Maka identifikasi masalah dalam penelitian ini yaitu mengenai pengetahuan pendidikan antikorupsi yang belum dipahami oleh semua peserta didik dan kurangnya kesadaran peserta didik dalam menerapkan nilai-nilai pendidikan antikorupsi untuk meningkatkan *civic disposition* peserta didik. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian ini berusaha untuk mendeskripsikan dan menjelaskan hubungan dari satu variabel dengan variabel lainnya dengan angka kemudian dianalisis menggunakan analisis regresi linier sederhana. Subjek penelitian ini adalah peserta didik kelas X dan XI di SMK Negeri 1 Bandar Lampung. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 116 peserta didik. Hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa pendidikan antikorupsi berpengaruh dalam meningkatkan *civic disposition* dengan presentase sebesar 40,7%, artinya pendidikan antikorupsi memiliki pengaruh yang cukup tinggi meningkatkan *civic disposition*. Peningkatan *civic disposition* peserta didik dapat dilihat dari indikator penelitian yang terdiri dari tanggung jawab, disiplin, kepedulian dan berpikir kritis yang dibutuhkan dalam mewujudkan kehidupan yang berintegritas baik secara privat maupun publik sejalan dengan pendidikan antikorupsi yang harus ditanamkan kepada peserta didik

Kata Kunci : Pendidikan Antikorupsi, Civic Disposition

ABSTRACT

THE EFFECT OF ANTI-CORRUPTION EDUCATION ON STRENGTHENING CIVIC DISPOSITION OF STUDENTS IN SMK NEGERI 1 BANDAR LAMPUNG

By

MUHAMMAD JULIANTO

This research aims to determine the effect of anti-corruption education on strengthening the civic disposition of students at SMK Negeri 1 Bandar Lampung. So the identification of the problem in this research is regarding knowledge of anti-corruption education which is not yet understood by all students and the lack of awareness of students in applying anti-corruption education values to increase students' civic disposition. The research method used in this research is a descriptive method with a quantitative approach. This research attempts to describe and explain the relationship between one variable and another variable using numbers and then analyzing it using simple linear regression analysis. The subjects of this research were students in classes X and XI at SMK Negeri 1 Bandar Lampung. The sample in this study amounted to 116 students. The results of the research that has been carried out show that anti-corruption education has an effect on increasing civic disposition with a percentage of 40.7%, meaning that anti-corruption education has a fairly high influence on increasing civic disposition. Increasing students' civic disposition can be seen from research indicators consisting of responsibility, discipline, concern and critical thinking which are needed to realize a life with integrity both privately and publicly in line with anti-corruption education which must be instilled in students.

Keywords: anti-corruption education, civic disposition

**PENGARUH PENDIDIKAN ANTIKORUPSI TERHADAP PENGUATAN
CIVIC DISPOSITION PESERTA DIDIK DI
SMK NEGERI 1 BANDAR LAMPUNG**

Oleh

MUHAMMAD JULIANTO

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA PENDIDIKAN

Pada

**Program Studi PPKn
Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung**



**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

Judul Skripsi : **PENGARUH PENDIDIKAN ANTIKORUPSI TERHADAP PENGUATAN *CIVIC DISPOSITION* PESERTA DIDIK DI SMK NEGERI I BANDAR LAMPUNG**

Nama Mahasiswa : **Muhammad Julianto**

Nomor Pokok Mahasiswa : **1713032014**

Program Studi : **Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan**

Jurusan : **Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial**

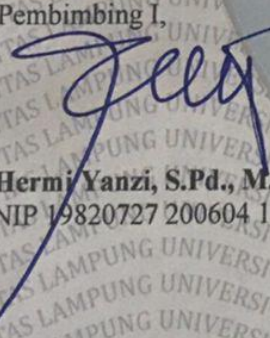
Fakultas : **Keguruan dan Ilmu Pendidikan**

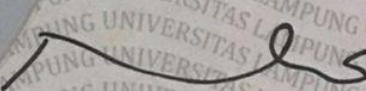


1. Komisi pembimbing

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Hermi Yanzi, S.Pd., M.Pd.
NIP 19820727 200604 1 002


Nurhayati, S.Pd., M.Pd.
NIK 231804920708201

2. Mengetahui

Ketua jurusan
Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial

Ketua program studi PPKn


Dr. Bedy Miswar, S.Si., M.Pd.
NIP 197411082005011003


Yunita Nuralisa, S.Pd., M.Pd.
NIP NIP19870602 200812 2 001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Hermi Yanzi, S.Pd., M.Pd.**

Sekretaris : **Nurhayati, S.Pd., M.Pd.**

Penguji
Bukan Pembimbing : **Drs. Berchah Pitoewas, M.H.**

Dean Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Dr. Sunyono, M.Si.
NIP. 196512301991111001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: **17 Oktober 2023**



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah, adalah :

Nama : Muhammad Julianto
NPM : 1713032014
Prodi/Jurusan : PPKn/Pendidikan IPS
Fakultas : Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Alamat : Jl. Break Meayer, Landbaw, Gisting, Tanggamus

Dengan ini menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya orang lain yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebut dalam daftar pustaka.

Bandarlampung, 17 Oktober 2023

Demi



RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Gisting, pada tanggal 19 Juli 1999. Anak kedua dari dua bersaudara buah pasangan dari bapak Anwar dan Ibu Sulasmi. Penulis menyelesaikan Pendidikan di Sekolah Dasar (SD) Negeri 1 Landbaw Tahun 2011, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Gisting Tahun 2014, Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Sumberejo Tahun 2017.

Pada tahun 2017 Penulis melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi Negeri yang ada di Provinsi Lampung dan diterima sebagai mahasiswa Program Studi PPKn Jurusan Pendidikan IPS Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung melalui jalur non tes atau Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN). Penulis semasa kuliah mengikuti organisasi tingkat Prodi sampai Universitas, termasuk sebagai kepala bidang Minat dan Bakat Fordika Periode 2019-2020, serta aktif di Organisasi Eksternal Kampus yaitu PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia) sebagai Ketua Umum Cabang PMII Bandarlampung. Penulis melaksanakan Kunjungan Kerja Ilmiah (KKI) dengan tujuan Yogyakarta Bandung-Jakarta Tahun 2019 dan melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di desa Tanjung Sari Kecamatan Bulok Kabupaten Tanggamus serta melaksanakan Pengenalan Lapangan Persekolahan (PLP) di SMA Negeri 1 Sumberejo.

MOTTO

“Karakter yang membuat kita keluar dari tempat tidur, komitmen yang memindahkan kita ke dalam tindakan, dan disiplin yang membuat kita mampu untuk menindaklanjuti.”

(Zig Ziglar)

“Tidak Ada Yang Mudah Jika Engkau Mencarinya Melalui Dirimu Sendiri, Dan Tidak Ada Yang Sulit Jika Engkau Mencarinya Melalui Tuhanmu”

(Muhammad Julianto)

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat kesempatan kupersembahkan karya ini sebagai tanda cinta, kasih sayang, dan baktiku kepada :

Orang tua tercinta Kakek (Sarno), Nenek (Almh. Romti) dan Ibunda (Sulasmi) serta keluarga besarku yang selalu menjadi motivasi, dan yang selalu mencurahkan kasih sayangnya, dan juga selalu mendukung dan mendoakan keberhasilanku.

Guruku yang telah mengajarkanku tentang banyak hal dan Seluruh Dosen yang telah dengan sabar membimbing, mendidik dan mengarahkan ku hingga berhasil.

Serta
Almamater tercinta Universitas Lampung

SANWACANA

Syukur Alhamdulillah berkat rahmat dan hidayah Allah SWT sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “**Pengaruh Pendidikan Antikorupsi Terhadap Penguatan *Civic Disposition* Peserta Didik Di SMK Negeri 1 Bandar Lampung**”. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Pendidikan pada program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Lampung. terselesaikannya penulisan skripsi ini tidak terlepas dari hambatan yang datang baik dari luar maupun dari dalam diri penulis. Berkat bimbingan, saran, motivasi dan bantuan baik moral maupun spiritual serta arahan dari berbagai pihak sehingga segala kesulitan dapat terlewati dengan baik. Dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Sunyono, M.Si., sebagai Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Riswandi, M.Pd., sebagai Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kerjasama Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung;
3. Bapak Albet Maydiantoro, S.Pd., M.Pd., sebagai Wakil Dekan Bidang Umum Keuangan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung;
4. Bapak Hermi Yanzi, S.Pd., M.Pd., sebagai Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung;
5. Bapak Dedy Miswar, S.Si., M.Pd., sebagai Ketua Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung;
6. Ibu Yunisca Nurmalisa, S.Pd., M.Pd sebagai Ketua Program Studi PPKn Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung;

7. Bapak Hermi Yanzi, S.Pd., M.Pd., sebagai pembimbing akademik dan pembimbing I terima kasih telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran serta motivasi, dan nasehat dalam penyelesaian skripsi ini tanpa ada bantuan bapak saya tidak dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya;
8. Ibu Nurhayati, S.Pd., M.Pd., sebagai pembimbing II, terima kasih atas bimbingan, ilmu, waktu, tenaga, arahan, serta nasehatnya selama ini, tanpa masukan yang membangun dari Ibu saya tidak dapat menyelesaikan skripsi ini dengan mudah;
9. Bapak Drs. Berchah Pitoewas, M.H. sebagai pembahas I terima kasih atas saran dan masukannya sehingga dapat menyempurnakan skripsi ini menjadi lebih baik;
10. Ibu Devi Sutrisno Putri, S.Pd., M.Pd. sebagai pembahas II terima kasih atas saran dan masukannya sehingga dapat menambah pengetahuan sehingganya penulisan skripsi ini menjadi lebih lengkap;
11. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung, terima kasih atas segala ilmunya, motivasi, serta segala bantuan yang telah diberikan;
12. Teristimewa untuk Nenek Terkasih Almh. Romti, Kakek Terkeren Sarno dan Ibuku Tercinta Sulasmi. Terima kasih atas ketulusan, keikhlasan, kasih sayang dan kesabaran yang diberikan kepadaku. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan nikmat sehat, kebahagiaan dan senantiasa menjaga keluargaku;
13. Ibu Dra. Helmiyati, M.M. selaku Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Bandar Lampung yang telah memberikan izin penelitian dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis.
14. Terima Kasih untuk Seniorku Mas Suroto, S.Pd., M.Pd. yang selalu memberikan ilmu, motivasi, dorongan dan pendampingan serta semua bantuan yang telah diberikan;
15. Seluruh Senior Dosen PMII Komisariat Universitas Lampung Bapak Rudy Lukman, Bapak Iwan Satriawan, Babeh Maskun, Bapak Riswandi, Bapak Fitriadi, Bapak Zulkarnain, Mas Imam Mahmud, Mas Ridho, Mas Agung,

Makwan Farida, Miss Novita, Miss Naili yang senantiasa memberikan semangat dan dorongan untuk terus berproses.

16. Seluruh Senior dan Alumni PMII Lampung Bang Syahrudin Putera, Bang Aryanto Munawar, Kak Jauharoh Haddad, Bang Bustami Zainuddin, Kanjeng Noverisman Subing, Bang Ichwan Adji, Uwo Erlina, Mas Imam Santoso, Bang Nasir, Bang Judistama, Bang Mutakin, Bang Eka Setiawan dan lainnya, yang selalu hangat dalam berdiskusi dan memberikan arahan serta nasihat.
17. Keluargaku Kontrakan Elit F20 Celvien Anshara, Yudi Prayoga, Rama Arya Sanjaya, Dimas Adi, Khoirul Ashabi, Aldi Anshara, Ulil Absor, Sandi Pratama, Fani Setiawan, Rangga. Rasa syukur yang teramat dalam bisa bertemu, hidup dan berjuang bersama, begitu membahagiakan dan terimakasih banyak, kita lanjut terus.
18. Teman Seperjuangan Malik Purnama, Ahmad Rifai, Ahman Tosy Hartino, Aqshal, Handry, Bagus, Agung, Melinda, Irhaz, Astri, Tesa, Hanum, Cinday, Denty, Nita, Eka, Lailatul, sah jadi sekoci terakhir yang lulus, semoga kesuksesan dan kebahagiaan selalu hadir dalam hidup kita semua.
19. Para Mentor dan Sahabat Seperjuangan, Mas Nasikhin, Bang Rama, Bang Yoga Mas Erzal, Mbak Ratih, Mbak Fathia, Bang Arya, Bang Kausar, Bang Falamy, Mbak Ifah, Mbak Dilla, Abdul Rozak, Riyan Yulianto, Andi Adam, Nur Hamzah, Wulan Handayani, Eka Ristu, Septian, Adung, Irfan Arraffii, Dicky Rahmansyah, Devina, dan Habibah.
20. Seluruh Pengurus Cabang PMII Kota Bandar Lampung, terutama tim “Lincak” Arief Rahman Hakim, Deki Pebriansyah, Adi Widiatmoko, Diana Berliyani, terimakasih telah membersamai dalam mengemban amanah, semoga dedikasi sahabat semua diberikan keberkahan oleh Allah SWT.
21. Keluarga Besar PMII Komisariat Universitas Lampung khususnya Rayon KIP, Adik-Adiku Tercinta, Ujang Diki, Teguh Yuhono, Raffi Naufal, Halimatusadiyah, Cica Gafuarta, Aria Prasetyo, Ahmad Mulyawan, Harun Yahya, Doni Mardianto, Amar, Daif Kurniawan dan lainnya, semoga kekeluargaan kita semua selalu terjaga,

22. Teman-teman keluarga besar PPKn angkatan 2017 yang selalu bersama berjuang dan belajar menimba ilmu. Semoga kelak kita dipertemukan kembali dengan cerita yang membahagiakan.
23. Teman seperjuangan KKN yang luar biasa Andi, Uci, Okta, Umroh, Rintan dan Tanti serta Teman PPL SMA N 1 Sumberejo Sandi, Fitra, Titik, Mira, Delta, Dewi, Fitri, terima kasih atas waktu dan kebersamaannya;
24. Serta semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak membantu sehingga penelitian ini dapat terselesaikan. Semoga mendapatkan pahala dari Allah SWT.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan penyajiannya. Akhirnya penulis berharap semoga dengan kesederhanaannya skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Bandar Lampung, 17 Oktober 2023

Penulis,

Muhammad Julianto
1713032014

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
SURAT PERNYATAAN	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
MOTTO	viii
SANWACANA	x
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR GAMBAR	xix
DAFTAR LAMPIRAN	xx

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	4
C. Pembatasan Masalah	4
D. Rumusan Masalah	5
E. Tujuan Penelitian	5
F. Kegunaan Penelitian.....	5
G. Ruang Lingkup Penelitian.....	6

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Deskripsi Teori.....	7
1. Tinjauan Pendidikan Antikorupsi.....	7
2. Tinjauan Tentang Penguatan <i>Civic Disposition</i>	12
B. Kajian Penelitian Relevan	15
C. Kerangka Berpikir.....	16
D. Hipotesis.....	17

BAB III METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian.....	18
B. Populasi Dan Sampel Penelitian	18
1. Populasi	18
2. Sampel.....	19
C. Variabel Penelitian	20
1. Variabel Bebas (Independent Variable).....	20
2. Variabel Terikat (dependent variable)	20
D. Definisi Konseptual Dan Operasional.....	20
1. Definisi Konseptual	20
2. Definisi Operasional	21
E. Teknik Pengumpulan Data.....	23
1. Angket	23
2. Tes.....	24
3. Wawancara.....	24
4. Observasi.....	25
F. Instrumen Penelitian.....	25
1. Angket	25
2. Tes.....	26
3. Wawancara.....	26
4. Observasi.....	26
G. Uji Validitas dan Realibilitas	27
1. Uji Validitas.....	27
2. Uji Realibilitas.....	29
H. Teknik Analisis Data.....	31
1. Analisis Distribusi Frekuensi.....	31
2. Uji Prasyarat	32
3. Uji Regresi Sederhana	33

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	34
1. Sejarah singkat berdirinya SMK Negeri 1 Bandarlampung	34
2. Keadaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan	36
3. Sarana dan Prasarana	36

4. Visi dan Misi SMK Negeri 1 Bandarlampung.....	37
B. Deskripsi Data.....	37
1. Pendidikan Antikorupsi (X).....	37
2. Civic Disposition (Y).....	43
3. Uji Prasyarat	49
C. Pembahasan.....	54
1. Pendidikan Antikorupsi (Variabel X)	54
2. Civic Disposition (Variabel Y).....	58
3. Pengaruh Pendidikan Antikorupsi (X) Terhadap <i>Civic Disposition</i> Peserta Didik Di SMK Negeri 1 Bandarlampung (Y)	61
D. Keterbatasan Penelitian	63

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	64
B. Saran.....	64

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Jumlah Populasi Penelitian.....	19
2. Jumlah Sampel Penelitian	19
3. Uji Validitas Instrumen Penelitian	27
4. Koefisien Reliabilitas.....	30
5. Uji Realibilitas.....	31
6. Kondisi Sarana dan Prasarana SMK Negeri 1 Bandarlampung.....	36
7. Distribusi Frekuensi Indikator Memahami.....	38
8. Distribusi Frekuensi Indikator Menerapkan.....	39
9. Distribusi Frekuensi Indikator Menganalisis.....	41
10. Distribusi Frekuensi Variabel Pendidikan Antikorupsi.....	42
11. Distribusi Frekuensi Indikator Tanggung Jawab.....	43
12. Distribusi Frekuensi Indikator Disiplin.....	45
13. Distribusi Frekuensi Indikator Kepedulian.....	46
14. Distribusi Frekuensi Indikator Berpikir Kritis.....	47
15. Distribusi Frekuensi Variabel <i>Civic Disposition</i>	49
16. Hasil Uji Prasyarat Normalitas.....	50
17. Hasil Uji Prasyarat Linearitas.....	50
18. Uji Korelasi Variabel X terhadap Variabel Y	52
19. Uji Persamaan Regresi Pendidikan Anti Korupsi (X) terhadap Sikap Civic Disposition (Y)	52
20. Uji Determinasi Variabel X terhadap Y.....	53

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Kerangka Berfikir.....	16
2. Keterkaitan Antar Variabel.....	20
3. Histogram Indikator Memahami.....	38
4. Histogram Indikator Menerapkan.....	40
5. Histogram Indikator Menganalisis.....	41
6. Histogram Variabel Pendidikan Antikorupsi.....	42
7. Histogram Indikator Tanggung Jawab	44
8. Histogram Indikator Disiplin.....	45
9. Histogram Indikator Kepedulian.....	46
10. Histogram Indikator Berpikir Kritis.....	48
11. Histogram Variabel <i>Civic Disposition</i>	49

DAFTAR LAMPIRAN

1. Daftar Tabel Distribusi Skor Angket
2. Kisi-kisi Angket Penelitian
3. Angket Penelitian
4. Dokumentasi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tingkat korupsi yang begitu tinggi tentu merupakan sebuah permasalahan yang dalam upaya pemberantasannya dibutuhkan suatu kerja keras, tentu upaya tersebut tidak bisa hanya mengandalkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melainkan harus juga dilakukan oleh seluruh elemen bangsa. Dalam upaya pemberantasan korupsi juga tidak boleh hanya fokus dalam penindakan yang terkadang belum mampu memberikan efek jera pada pelaku, sehingga sampai saat ini masih banyak ditemukan kasus korupsi, artinya upaya pencegahan atau upaya *preventif* mencegah korupsi yang harus terus ditingkatkan untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat.

Menurut Koesoemo, (2017) menjadi sangat naif memberantas kemiskinan, meningkatkan pelayanan kesehatan, atau mempertinggi mutu pendidikan jika korupsi tetap dibiarkan tumbuh subur, sebab korupsi adalah sumber bencana dan kejahatan atau *the roots of all evils*. Korupsi merupakan sebuah tindak pidana yang dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) menimbulkan dampak yang luarbiasa karena tindak pidana korupsi terjadi secara sistemik dan meluas yang selama ini sangat merugikan negara, mengganggu stabilitas dan keamanan masyarakat serta mengikis nilai demokrasi, etika, kepastian dan keadilan hukum sehingga berdampak terhadap pembangunan, terlebih ada hak-hak sosial ekonomi masyarakat.

Untuk menumbuhkan sikap antikorupsi pada generasi muda, maka sikap antikorupsi harus dimulai sejak dini. Untuk mewujudkan hal itu, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo, Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohamad Nasir, serta Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin, menandatangani komitmen bersama untuk mengimplementasikan pendidikan antikorupsi pada jenjang pendidikan dasar, menengah, dan tinggi. (Siaran Pers BKLM, Nomor: 261/Sipres/A5.3/HM/XII/2018).

Sebagai tindak lanjut dari komitmen dalam Rapat Koordinasi Nasional Pendidikan Antikorupsi 2018, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia menerbitkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Tentang Implementasi Pendidikan Karakter dan Budaya Antikorupsi pada Satuan Pendidikan Nomor: 420/4047/SJ, dan Nomor: 420/4048/SJ, 20 Mei 2019. Surat Edaran tersebut ditujukan kepada Gubernur dan Bupati/Walikota di Seluruh Indonesia untuk dapat melakukan Implementasi Pendidikan Karakter dan Budaya Antikorupsi pada satuan pendidikan di masing-masing daerah.

Pemerintah Provinsi Lampung telah menerbitkan Peraturan Gubernur Lampung No. 35 Tahun 2019 tentang implementasi pendidikan antikorupsi, artinya pendidikan antikorupsi (PAK) wajib dilaksanakan oleh satuan pendidikan di sekolah. PAK sebagai upaya menumbuhkan budaya antikorupsi di kalangan pelajar di Provinsi Lampung, SMK Negeri 1 Bandarlampung merupakan salah satu sekolah di Kota Bandarlampung yang telah menerapkan PAK

Secara umum tujuan pendidikan antikorupsi yaitu: *Pertama* pembentukan pengetahuan dan pemahaman mengenai bentuk korupsi dan aspek-aspeknya, *Kedua* pengubahan persepsi dan sikap terhadap korupsi; dan *Ketiga*

pembentukan keterampilan dan kecakapan baru yang ditujukan untuk melawan korupsi. Dengan ketiga tujuan itu dapat dilihat bahwa pendidikan antikorupsi meskipun mempunyai sasaran utama sebagai pendidikan nilai akan tetapi tetap meliputi ketiga ranah pendidikan sebagaimana dikemukakan oleh Bloom dalam (Aziz, et.al. 2017)) yaitu pengembangan ranah *kognitif*, *afektif* dan *psikomotor* siswa.

Hal ini sejalan dengan pendapat Branson, (1998) yang mengatakan bahwa tujuan utama dari *civic disposition* adalah untuk menumbuhkan karakter warga negara, baik karakter privat seperti, tanggungjawab moral, disiplin diri, dan penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia dari setiap individu, maupun karakter publik misalnya; kepedulian sebagai warga, kesopanan, mengindahkan aturan main (*rule of law*), berpikir kritis, dan kemauan untuk mendengar, bernegosiasi dan kompromi. Maka dari itu penguatan *civic disposition* pada peserta didik perlu dilakukan, hal ini bertujuan untuk membentuk kepribadian antikorupsi.

Berdasarkan rumusan yang ditentukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), ada sembilan nilai dasar yang perlu ditanamkan dan diperkuat melalui pelaksanaan pembelajaran pendidikan antikorupsi di sekolah, yaitu nilai kejujuran, adil, berani, hidup sederhana, tanggung jawab, disiplin, kerja keras, hemat dan mandiri. Sehingga diharapkan siswa yang mempelajari pendidikan antikorupsi menjadi warga negara yang baik dan bertanggung jawab, dan mampu memahami dan menjalankan nilai-nilai antikorupsi, serta akhirnya memperkuat konsep *civic disposition* dengan tumbuhnya karakter privat dalam diri peserta didik seperti tanggung jawab dan disiplin serta karakter publik seperti kepedulian, berpikir kritis dan mau mendengarkan orang lain.

Pembelajaran pendidikan antikorupsi yang selaras dengan konsep *civic disposition* tentu dimaksudkan sebagai langkah penanaman nilai antikorupsi pada peserta didik. Akan tetapi berdasarkan hasil penelitian pendahuluan yang sudah dilakukan oleh peneliti di SMK Negeri 1 Bandarlampung yang

sudah menerapkan pendidikan antikorupsi masih ditemukan kegiatan atau perbuatan peserta didik yang tidak disiplin, belum bertanggung jawab, kurangnya kepedulian dan tidak menghormati orang lain yang tentu tidak sejalan dengan nilai dasar pendidikan antikorupsi di sekolah, seperti masih ditemukan peserta didik yang mengabaikan tanggung jawab mengerjakan tugas dari pendidik sehingga masih ditemukan peserta didik yang terlambat atau bahkan tidak mengerjakan, berbagai tindakan indiscipliner seperti bolos sekolah, terlambat masuk sekolah atau terlambat masuk kelas saat jeda jam istirahat, kurang peduli pada lingkungan, *apatis* dan tidak saling menghargai.

Tentu berbagai perbuatan tersebut merupakan permasalahan dalam membentuk konsep *civic disposition* pada peserta didik yang sangat penting sebagai pedoman menumbuhkan kesadaran sikap antikorupsi. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Pendidikan Antikorupsi Terhadap Penguatan *Civic Disposition* Peserta Didik di SMK Negeri 1 Bandarlampung”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, fokus penelitian ini adalah pengaruh pendidikan antikorupsi terhadap penguatan *civic disposition* peserta didik di SMK Negeri 1 Bandarlampung. Maka identifikasi masalah yang didapat yaitu maka dapat didefinisikan beberapa permasalahan yaitu sebagai berikut:

1. Pengetahuan mengenai pendidikan antikorupsi belum dipahami oleh semua peserta didik.
2. Kurangnya kesadaran peserta didik dalam menerapkan nilai-nilai Pendidikan Antikorupsi dalam meningkatkan *Civic Disposition* Peserta Didik

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang luas, maka batasan masalah penelitian ini adalah Pengaruh Pendidikan Antikorupsi Terhadap Penguatan *Civic Disposition* Peserta Didik SMK Negeri 1 Bandarlampung.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah identifikasi masalah, dan pembatasan masalah maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimanakah Pengaruh Pendidikan Antikorupsi Terhadap Penguatan *Civic disposition* Peserta Didik di SMK Negeri 1 Bandarlampung?”.

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan serta mendiskripsikan Pengaruh Pendidikan Antikorupsi Terhadap Penguatan *Civic Disposition* Peserta Didik Di SMK Negeri 1 Bandarlampung.

F. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

1. Kegunaan Teoritis

Hasil dari penelitian ini dapat berguna sebagai penambah wawasan keilmuan dan sumbangan pemikiran atau bahan kajian dalam pendidikan terutama mengenai pengaruh pendidikan antikorupsi terhadap penguatan *civic disposition* peserta didik.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Peserta Didik

Melalui penelitian ini diharapkan menjadi bahan evaluasi bagi peserta didik agar dapat memperkuat implementasi sikap tanggung jawab, disiplin, peduli, dan berpikir kritis serta saling menghormati

b. Bagi Guru

Penelitian ini berguna untuk memberikan masukan bagi pendidik agar dapat meningkatkan hasil belajar dan aktifitas siswa di kelas dan di luar kelas, dapat dipakai untuk perbaikan di dalam pembelajaran, memperluas cara pandang guru dalam pembelajaran di kelas, dapat mengoptimalkan kemampuan guru dalam pengelolaan kegiatan belajar mengajar.

c. Bagi Sekolah

Melalui penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan evaluasi bagi sekolah agar lebih memperhatikan apa saja yang dibutuhkan dalam menciptakan suasana atau lingkungan sekolah yang baik.

d. Bagi Peneliti

Mengetahui pengaruh pendidikan antikorupsi terhadap penguatan *civic disposition* peserta didik sebagai tambahan wawasan untuk peneliti yang dapat menjadi sumber dalam pengembangan pendidikan antikorupsi dan *civic disposition*.

G. Ruang Lingkup Penelitian

1. Ruang Lingkup Ilmu

Penelitian ini termasuk dalam ruang lingkup kajian ilmu Pendidikan Nilai Moral Pancasila, karena mengkaji aspek-aspek perilaku pengetahuan, keterampilan dan watak/karakter warga negara yang berkaitan dengan budi pekerti luhur dan nilai-nilai sosial.

2. Ruang Lingkup Objek Penelitian

Ruang lingkup objek penelitian ini adalah Pendidikan Antikorupsi dan *Civic Disposition*.

3. Ruang Lingkup Subjek Penelitian

Ruang lingkup subjek penelitian ini adalah Peserta Didik Kelas X di SMK Negeri 1 Bandarlampung.

4. Ruang Lingkup Tempat Penelitian

Ruang lingkup tempat penelitian ini ialah SMK Negeri 1 Bandarlampung.

5. Ruang Lingkup Waktu Penelitian

Pelaksanaan penelitian ini dimulai sejak dikeluarkannya surat izin penelitian pendahuluan oleh Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung dengan Nomor **1606/UN26.13/PN.01.00/2023**.

Sampai dengan penelitian selesai pada tanggal 19 Juni 2023.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Deskripsi Teori

1. Tinjauan Pendidikan Antikorupsi

a. Pengertian Pendidikan Antikorupsi

Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional “Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat”.

Sedangkan menurut Menurut Ki Hajar Dewantara dalam Siswoyo dkk., (2007: 18) yang dinamakan pendidikan yaitu tuntunan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Adapun maksudnya pendidikan yaitu, menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu, agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapatlah mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi tingginya.

Selaras Siswoyo dkk., (2008), menyatakan betapa besarnya nilai pendidikan bagi individu, masyarakat dan suatu bangsa karena pendidikan sangat berguna untuk membentuk pribadi yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, melestarikan nilai leluhur dan

terbuka dengan nilai-nilai baru yang dianggap serasi dalam menghadapi tantangan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Dapat disimpulkan bahwa Pendidikan adalah upaya pemerintah untuk mencerdaskan bangsa, akan tetapi jika seseorang cerdas tidak dibarengi moral yang baik maka semua akan terbuang begitu saja, dan terlebih bahwa benih benih tentang penanaman nilai moral yang baik harus dimulai melalui pendidikan. Dengan pendidikan kita lebih dewasa karna pendidikan tersebut memberikan dampak yang sangat positif seperti meningkatkan keterampilan, kemampuan mental dan lain sebagainya. Pendidikan merupakan modal yang sangat penting dalam menjalani kehidupan bermasyarakat.

Menurut Wibisono, (2011: 22) Pengertian Korupsi adalah bentuk penyalahgunaan kekuasaan ataupun wewenang yang dilakukan secara individual ataupun kolektif untuk mendapatkan keuntungan dengan cara melawan hukum sehingga menimbulkan kerugian baik bagi masyarakat maupun negara.

Sedangkan menurut Kristiono, (2018) Korupsi secara sederhana dapat diartikan sebagai perbuatan menggelapkan dana untuk kepentingan pribadi. Korupsi di Indonesia telah berkembang dengan sangat subur sehingga korupsi harus dipandang sebagai kejahatan yang luar biasa yang oleh karena itu memerlukan upaya luar biasa pula untuk memberantasnya.

Lebih lanjut Nurmalisa dkk., (2022) menyatakan pendidikan antikorupsi yang diberikan pada pelajar, diharapkan bisa melahirkan generasi muda yang akan menjadi pemimpin masa depan bangsa Indonesia. Sebagai generasi yang secara keilmuan memiliki karakter integritas, kepribadian baik, mampu bertanggung jawab pada diri sendiri dan lingkungannya.

Dapat disimpulkan bahwa korupsi adalah bentuk penyalahgunaan kekuasaan ataupun wewenang yang dilakukan secara individual ataupun kolektif untuk mendapatkan keuntungan dengan cara melawan hukum sehingga menimbulkan kerugian baik bagi masyarakat maupun negara.

Selanjutnya Pendidikan antikorupsi dalam Rusdini, (2016, hlm. 25) adalah sebagai usaha sadar untuk memberikan pemahaman tentang bahaya korupsi dan mencegah terjadinya perbuatan korupsi yang dilakukan selama proses pembelajaran di sekolah.

Sedangkan Wibowo, (2013: 38) berpendapat bahwa pendidikan antikorupsi merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan proses belajar mengajar yang kritis terhadap nilai-nilai antikorupsi. Lebih lanjut menurut Umar, (2012) tujuan pendidikan antikorupsi tidak lain untuk membangun karakter teladan agar anak juga dapat menjadi promotor pemberantasan korupsi.

Dapat disimpulkan bahwa pendidikan antikorupsi adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan proses belajar mengajar yang kritis terhadap nilai-nilai antikorupsi. Dalam proses tersebut, maka pendidikan antikorupsi bukan sekedar media bagi transfer pengalihan pengetahuan (*kognitif*), namun juga menekankan pada upaya pembentukan karakter (*afektif*), dan kesadaran moral dalam melakukan perlawanan (*psikomotorik*), terhadap penyimpangan perilaku korupsi.

b. Pengertian Sikap Antikorupsi

Menurut Aryani, (2011) Sikap Antikorupsi adalah tindakan yang tidak menyetujui segala upaya yang ditempuh setiap individu untuk memperkaya diri sendiri atau kelompoknya atau sikap yang tidak mendukung atau menyetujui terhadap berbagai upaya yang dilakukan oleh seseorang atau korporasi untuk merugikan keuangan negara atau

perekonomian negara yang dapat menghambat pelaksanaan pembangunan nasional.

Sedangkan pengertian antikorupsi menurut Dahlan, (2006: 114): korupsi artinya tidak setuju, tidak suka dan tidak senang terhadap korupsi.

Karena perbuatan korupsi dalam konteks agama sama dengan *fasad*, yakni perbuatan yang merusak tatanan kehidupan dan pelakunya dianggap telah melakukan dosa besar dan merupakan perbuatan yang menyimpang dari tatanan kehidupan bermasyarakat.

Lebih lanjut Menurut Darmawan (Kesuma, 2009: 1) setidaknya antikorupsi memiliki sembilan nilai dasar yakni, kejujuran, kerja keras, disiplin, berani, tanggung jawab, mandiri, sederhana, adil, dan peduli.

KPK dalam bukunya mengenali dan memberantas korupsi menjelaskan: Antikorupsi merupakan kebijakan untuk mencegah dan menghilangkan peluang bagi berkembangnya korupsi. Pencegahan yang dimaksud adalah bagaimana meningkatkan kesadaran individu untuk tidak melakukan korupsi dan bagaimana menyelamatkan uang dan aset negara. Peluang bagi berkembangnya korupsi dapat dihilangkan dengan melakukan perbaikan sistem dan perbaikan manusia dalam moralnya.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa sikap antikorupsi merupakan suatu tindakan yang berlandaskan nilai-nilai antikorupsi yang tidak menyetujui terhadap berbagai upaya yang dilakukan oleh setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yang dapat menghambat pelaksanaan pembangunan nasional.

c. Implementasi Pendidikan Antikorupsi

Menurut Biyanto, (2010) implementasi pendidikan antikorupsi di sekolah menjadi penting bahkan hingga ke jenjang perguruan tinggi karena dunia pendidikan khususnya lembaga pendidikan pada umumnya memiliki seperangkat pengetahuan (*knowledge*) dan pelibatan lembaga pendidikan akan menjadikan usaha pemberantasan korupsi dapat menjelma sebagai gerakan massif.

Seperti halnya pendidikan kewarganegaraan, pendidikan antikorupsi pada dasarnya merupakan pembelajaran yang mengarah kepada pembentukan warga negara yang baik dan bertanggung jawab berdasarkan nilai-nilai antikorupsi, sehingga pendidikan antikorupsi juga harus memiliki komponen-komponen dalam pembelajarannya, seperti yang diungkapkan Wahab, (2011:333) bahwa komponen pembelajaran seperti, pendekatan, strategi, dan metode pembelajaran penting untuk mencapai keberhasilan pembelajaran, sehingga pendidikan antikorupsi dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kreatif, inspiratif dan interaktif pada peserta didik.

Lebih lanjut menurut Angraini, (2019) Implementasi pendidikan antikorupsi dapat dikembangkan secara mandiri dalam diri seseorang dapat pula dilaksanakan dengan diintegrasikan ke dalam mata pelajaran yang sudah ada maupun dalam mata pelajaran muatan lokal sehingga Pendidikan antikorupsi dapat dikembangkan dan ditetapkan sekolah/daerah dengan mengakomodasi kearifan dan keunggulan lokal serta kebutuhan peserta didik/daerah setempat.

Artinya pendidikan antikorupsi bisa dipandang sebagai mata pelajaran yang dapat memberikan penguatan kepada siswa untuk membangun karakter generasi muda, serta dapat memenuhi kebutuhan masyarakat untuk menjadikan negara ini lebih transparan, maju, dan bebas korupsi

selaras dengan tujuan dari pendidikan antikorupsi yaitu membangun nilai-nilai dan mengembangkan kapasitas untuk membentuk posisi dalam melawan korupsi terlebih melalui pendidikan antikorupsi pembangunan karakter bangsa yang kuat, mandiri, berkualitas serta sehat akan dapat diwujudkan demi masa depan Indonesia.

2. Tinjauan Tentang Penguatan *Civic Disposition*

a. Pengertian *Civic Disposition*

Menurut Raharja dkk., (2017:204) *Civic Disposition* atau watak kewarganegaraan adalah mengisyaratkan pada karakter publik maupun privat yang penting pada pemeliharaan pengembangan demokrasi dan konstitusi, watak-watak kewarganegaraan berkembang secara perlahan dari pengalaman-pengalaman yang dialami seorang dari lingkungan sekolah komunitas dan organisasi-organisasi *civil society*.

Sedangkan Kalidjernih, (Malatuny, 2017;61) mengemukakan bahwa *Civic Disposition* merupakan istilah yang terdapat didalam pendidikan kewarganegaraan yang merujuk pada watak atau karakter dan komitmen yang diperlukan dalam memelihara dan memajukan kewarganegaraan dan pemerintah.

Selanjutnya Winarno, (2014: 177) menyatakan bahwa *Civic Disposition* merupakan salah satu komponen pendidikan kewarganegaraan yang diterjemahkan sebagai watak, sikap, atau karakter kewarganegaraan.

Dapat disimpulkan bahwa *civic disposition* adalah watak atau karakter dan komitmen yang diperlukan dalam memelihara dan memajukan kewarganegaraan dan pemerintah, watak-watak tersebut berkembang dari pengalaman-pengalaman yang dialami seseorang dari lingkungan sekolah, komunitas serta organisasi lainnya.

b. Konsep *Civic Disposition*

Menurut Syahroni, (2016) *Civic Disposition* merupakan sikap kewarganegaraan yang harus dimiliki warga negara yang baik, sikap yang mencerminkan suatu kehormatan antar manusia, tanggung jawab, disiplin kepedulian, keterbukaan serta kemurahan hati.

Quigley, (1991) menyatakan *civic disposition* adalah “...those attitudes and habit of mind of the citizen that are conducive to the healthy functioning and common good of the democratic system” atau sikap dan kebiasaan berpikir warga negara yang menopang berkembangnya fungsi sosial yang sehat dan jaminan kepentingan umum dari sistem demokrasi lebih lanjut Quigley, (1991:13) juga mengatakan bahwa secara konseptual *civic disposition* meliputi sejumlah karakteristik kepribadian yakni

1. *Civility* atau keadaban (hormat pada orang lain dan partisipatif dalam kehidupan masyarakat);
2. *Individual responsibility* atau tanggung jawab individual;
3. *Self discipline* atau disiplin diri;
4. *Civic mindednes* atau kepekaan terhadap masalah kewargaan;
5. *Open mindednes* (terbuka, skeptis, ambiguitas);
6. *Compromise* (prinsip konflik dan batas-batas kompromi);
7. *Toleration of diversity* atau toleransi atas keberagaman;
8. *Patience and persistence* atau kesabaran dan ketaatan;
9. *Compassion* atau keterharuan
10. *Generosity* atau kemurahan hati, dan
11. *Loyalty to the nation and its principles* atau kesetiaan pada bangsa dan aturannya.

Sedangkan menurut Patrick & Vontz (Cholisin, 2010:8) komponen utama *Civic Disposition* yaitu membagikan kebaikan bersama, menegaskan harkat dan martabat setiap orang itu setara dan sama, menghormati, melindungi, dan menggunakan hak yang sama pada setiap orang, berpartisipasi dalam kehidupan berpolitik atau bermasyarakat dan menghormati, melindungi, dan pemerintah berpartisipasi dengan persetujuan rakyat serta mendukung dan berpartisipasi dalam kebijakan bermasyarakat.

Artinya *civic disposition* merupakan salah satu komponen pendidikan kewarganegaraan yang dinilai dapat menjadikan seseorang memiliki kepribadian yang bermartabat dan bertanggung jawab, karakter kewarganegaraan atau *civic disposition* telah menjadi bagian tidak terpisahkan dalam pembelajaran pendidikan kewarganegaraan.

c. Tujuan Civic Disposition

Menurut Mulyono, (2017) Tujuan utama dari *Civic Disposition* adalah untuk menumbuhkan karakter warga negara, baik karakter privat seperti; tanggungjawab moral, disiplin diri, dan penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia dari setiap individu, maupun karakter publik misalnya; kepedulian sebagai warga, kesopanan, mengindahkan aturan main (*rule of law*), berpikir kritis, dan kemauan untuk mendengar, bernegosiasi dan kompromi.

Sedangkan menurut Branson, (1998:11) menyatakan *Civic Disposition* merupakan sifat atau ciri dari karakter publik dan privat yang sangat penting untuk menjaga dan menanamkan sikap antikorupsi. Seperti *civic skills* atau keterampilan kewarganegaraan, karakter kewarganegaraan ini berkembang secara perlahan dari waktu ke waktu dan sebagai hasil dari apa yang kita pelajari di rumah, sekolah, masyarakat, dan organisasi dalam masyarakat.

Selanjutnya Nissa, (2020) menyatakan bahwa karakter privat seperti tanggung jawab moral, disiplin diri dan penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia dari setiap individu adalah wajib. Karakter publik juga tidak kalah penting. Kepedulian sebagai warga negara, kesopanan, mengindahkan aturan main (*rule of law*), berpikir kritis, dan kemauan untuk mendengar, bernegosiasi dan berkompromi merupakan karakter yang sangat diperlukan agar demokrasi berjalan sukses.

Dapat disimpulkan *Civic Disposition* yang diinternalisasikan melalui mata pelajaran pendidikan antikorupsi adalah untuk menumbuhkan karakter dan kepribadian yang baik baik secara privat maupun publik sehingga menjadikan warga negara yang cerdas dan berkarakter.

B. Kajian Penelitian Relevan

1. Penelitian yang dilakukan oleh Nur Shelina tahun 2015, dengan judul “Peran Pembelajaran PPKn dalam Membentuk Sikap Demokrasi untuk Meningkatkan *Civic Disposition* Siswa di SMA Negeri 4 Kota Bumi” yang menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan hasil penelitian bahwa: variabel pembelajaran PPKn mempengaruhi sikap demokratis untuk meningkatkan *civic disposition* siswa di SMA Negeri 4 Kotabumi.

Perbedaan penelitian ini dengan dengan penulis adalah penelitian yang akan diteliti oleh penulis terdapat pada jumlah variabel yang akan diteliti, pada penelitian ini terdapat 3 variabel sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti memiliki 2 variabel. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas tentang *civic disposition* serta metode penelitian juga sama yaitu menggunakan metode dekriptif dengan pendekatan kuantitatif.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Ulin Farischa Al Fidiyah pada Tahun 2020, dengan judul “Penanaman Nilai-nilai Pendidikan Antikorupsi Pada Mata Pelajaran Kewarganegaraan di MTs Tarbiyatut Tholabah Lamongan”. Penelitian ini berfokus kepada penanaman nilai antikorupsi pada mata pelajaran kewarganegaraan dengan menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Dengan hasil penelitian yang menunjukkan adanya proses penanaman nilai-nilai Pendidikan Antikorupsi Pada Mata Pelajaran Kewarganegaraan di MTs Tarbiyatut Tholabah Lamongan.

Penelitian ini relevan dengan penelitian penulis karena persamaan dalam variabel dependen yakni Antikorupsi. Letak perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis yakni pada variabel X penelitian ini yaitu korupsi, sedangkan penelitian penulis variabel X yaitu pendidikan antikorupsi dengan variabel Y penguatan *civic disposition*.

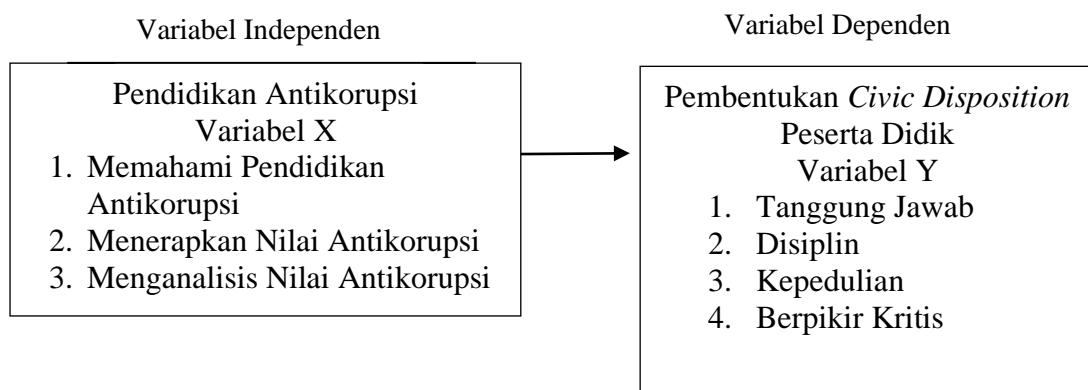
C. Kerangka Berpikir

Pendidikan antikorupsi adalah sebagai usaha sadar untuk memberikan pemahaman tentang bahaya korupsi dan mencegah terjadinya perbuatan korupsi yang dilakukan selama proses pembelajaran di sekolah.

Pembelajaran pendidikan antikorupsi yang selaras dengan konsep *civic disposition* yaitu membentuk watak atau karakter warga negara yang baik seperti karakter privat tanggungjawab moral dan disiplin diri maupun karakter publik seperti kepedulian sebagai warga, kesopanan, berpikir kritis, dan kemauan untuk mendengar.

Oleh karena itu peneliti perlu mengkaji tentang pengaruh pendidikan antikorupsi terhadap penguatan *civic disposition* untuk membentuk watak atau karakter warga negara yang baik khususnya pada peserta didik di SMK Negeri 1 Bandarlampung.

Berikut ini berdasarkan uraian diatas maka kerangka pikir yang secara ringkas agar lebih jelas tergambar pada skema di bawah ini:



Gambar 1: Kerangka Berfikir

D. Hipotesis

Berdasarkan latar belakang, teori dan kerangka berpikir permasalahan diatas, maka hipotesis penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. H_1 = Adanya Pengaruh Pendidikan Antikorupsi Terhadap Penguatan *Civic Disposition* Peserta Didik Smk Negeri 1 Bandarlampung.
 H_0 = Tidak Adanya Pengaruh Pendidikan Antikorupsi Terhadap Penguatan *Civic Disposition* Peserta Didik Smk Negeri Bandarlampung.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Dalam penelitian ini berusaha untuk mendeskripsikan dan menjelaskan hubungan dari satu variabel dengan variabel lainnya dengan angka. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adakah pengaruh pendidikan antikorupsi terhadap penguatan *civic disposition* peserta didik di SMK Negeri 1 Bandarlampung

Dalam penelitian ini peneliti juga ingin melihat pengaruh antar variabel bebas yaitu pendidikan antikorupsi dengan variabel terikat yaitu pembentukan *civic disposition* peserta didik. Dengan menggunakan metode penelitian pendekatan deskriptif kuantitatif ini peneliti ingin memaparkan data-data dan menganalisis secara objektif serta menunjukkan tentang pengaruh pendidikan antikorupsi terhadap penguatan *civic disposition* peserta didik

B. Populasi Dan Sampel Penelitian

1. Populasi

Sarwono, (2006:111) mengemukakan populasi didefinisikan sebagai seperangkat unit analisis yang lengkap yang sedang diteliti.

Sedangkan Arikunto, (2010:173) menyatakan bahwa populasi adalah keseluruhan objek penelitian. Apabila seseorang ingin meneliti s elemen yang ada dalam wilayah penelitian, maka penelitiannya merupakan penelitian populasi.

Menentukan populasi merupakan hal yang utama yang harus dilakukan dalam sebuah penelitian. Dalam penelitian ini, populasinya yaitu seluruh Peserta Didik SMK Negeri 1 Bandarlampung yang berjumlah 1593 Peserta Didik.

Tabel 1. Jumlah Populasi

No	Kelas	Total
1.	X	641
2.	XI	517
Total		1158

Sumber: Data Primer SMK Negeri 1 Bandarlampung

2. Sampel

Menurut Sarwono, (2006:111) sampel merupakan sub dari seperangkat elemen yang dipilih untuk dipelajari. Senada dengan penjelasan sebelumnya, Sugiyono, (2012:190) menyatakan bahwa, sampel adalah bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Dengan kata lain, sampel ialah subjek yang dipilih dari banyaknya populasi untuk diteliti dalam sebuah penelitian. Teknik sampling yang digunakan ialah proposional random sampling

Seperti yang dinyatakan oleh Arikunto (Diarsih, 2015:36) apabila subyek penelitian kurang dari 100, maka lebih baik diambil semua sehingga penelitiannya penelitian populasi. Namun, bila subjeknya lebih dari 100 dapat diambil 10% - 15% atau 20% - 25% atau lebih. Oleh karena itu, peneliti mengambil sampel dalam penelitian ini sebesar 10% dari jumlah populasi seluruh Peserta Didik SMK Negeri 1 Bandarlampung. Karena populasi Peserta Didik SMK Negeri 1 Bandarlampung mencapai 1593 Peserta Didik. Berikut merupakan data perincian sampel yaitu sebagai berikut:

Tabel 2. Jumlah Sampel

No.	Kelas	Jumlah Populasi	10%	jumlah sampel
1	X	641	64,1	64
2	XI	517	51,7	52
Jumlah		1158		116

Sumber: Data diolah oleh Peneliti, Februari Tahun 2023

Berdasarkan tabel diatas, sampel yang diambil sebesar 10% dari jumlah populasi Peserta Didik SMK Negeri 1 Bandarlampung yang melebihi 100 dengan jumlah 1158, didapat sebanyak 116 responden.

C. Variabel Penelitian

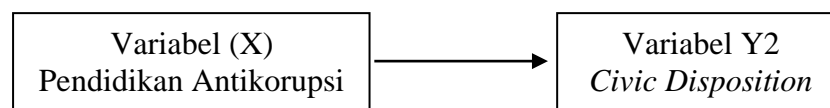
Menurut Bungin (2005:70) variabel adalah sebuah fenomena (yang berubah-ubah). Dengan demikian, maka bisa jadi tidak ada satu peristiwa di alam ini yang tidak dapat disebut variabel, tinggal tergantung bagaimana kulaitas variabelnya, yaitu bagaimana bentuk variasi fenomena tersebut. Variabel dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. Variabel Bebas (Independent Variable)

Variabel bebas adalah variabel yang menentukan arah atau perubahan tertentu pada variabel terikat, sementara variabel bebas berada pada posisi yang lepas dari pengaruh variabel terikat. Variabel bebas (X) dalam penelitian ini ialah pendidikan antikorupsi.

2. Variabel Terikat (dependent variable)

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah *civic disposition*. Hal ini senada dengan pendapat Nanang Martono (2016) mengatakan bahwa variabel terikat (Y) merupakan variabel yang diakibatkan atau dipengaruhi oleh variabel bebas.



Gambar 2. Keterkaitan Antar Variabel

D. Definisi Konseptual Dan Operasional

1. Definisi Konseptual

Sarwono (2006:68) mengemukakan definisi konseptual merupakan suatu konsep yang didefinisikan dengan referensi konsep yang lain,

karena lebih bersifat hipotekal dan tidak dapat diobservasi. Definisi konseptual dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Pendidikan Antikorupsi

Pendidikan antikorupsi adalah program pendidikan tentang korupsi yang bertujuan untuk membangun dan meningkatkan kepedulian warga negara terhadap bahaya dan akibat dari tindakan korupsi. Taget utama pendidikan antikorupsi adalah memperkenalkan fenomena korupsi yang mencakup kriteria, penyebab dan akibatnya, meningkatkan sikap tidak toleran terhadap tindakan antikorupsi, menunjukkan berbagai kemungkinan usaha untuk melawan korupsi serta berkontribusi terhadap standar yang ditetapkan sebelumnya terhadap nilai-nilai dan kapasitas untuk menentang korupsi dikalangan generasi muda.

b. Civic Disposition

Civic disposition merupakan istilah yang terdapat didalam pendidikan kewarganegaraan yang merujuk pada watak atau karakter dan komitmen yang diperlukan dalam memelihara dan memajukan kewarganegaraan dan pemerintah.

Civic Disposition atau watak kewarganegaraan tentu diterjemahkan pada karakter publik maupun privat pada diri seseorang, sangat penting untuk pemeliharaan pengembangan demokrasi dan konstitusi, watak-watak kewarganegaraan berkembang secara perlahan dari pengalaman-pengalaman yang dialami seorang dari lingkungan sekolah komunitas dan organisasi-organisasi *civil society*.

2. Definisi Operasional

Menurut Sarwono (2006:27) definisi operasional adalah definisi yang menjadikan variabel-variabel yang sedang diteliti menjadi bersifat operasional dalam kaitannya dengan proses pengukuran variabel-variabel tersebut. Definisi operasional yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Pendidikan Antikorupsi

Usaha sadar untuk memberikan pemahaman dan pencegahan terjadinya perbuatan korupsi yang dilakukan dari pendidikan formal di sekolah, pendidikan informal pada lingkungan keluarga dan non formal pada masyarakat. Pendidikan antikorupsi pada dasarnya merupakan pembelajaran yang mengarah kepada pembentukan warga negara yang baik dan bertanggung jawab berdasarkan nilai-nilai antikorupsi, sehingga pendidikan antikorupsi juga harus memiliki komponen-komponen dalam pembelajarannya

Adapun indikator yang dapat dijadikan tolak ukur dalam pembelajaran pendidikan antikorupsi yaitu:

1. Memahami Pendidikan Antikorupsi
2. Menerapkan Pendidikan Antikorupsi
3. Menganalisis Pendidikan Antikorupsi

b. Civic Disposition

Civic Disposition merupakan salah satu komponen pendidikan kewarganegaraan yang diterjemahkan sebagai watak, sikap, atau karakter kewarganegaraan, artinya *civic disposition* adalah watak atau karakter dan komitmen yang diperlukan dalam memelihara dan memajukan kewarganegaraan dan pemerintah, watak-watak tersebut berkembang dari pengalaman-pengalaman yang dialami seseorang dari lingkungan sekolah, komunitas serta organisasi lainnya.

Tujuan utama dari *Civic Disposition* adalah untuk menumbuhkan karakter warga negara, baik karakter privat seperti; tanggungjawab moral, disiplin diri, dan penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia dari setiap individu, maupun karakter publik misalnya; kepedulian sebagai warga, kesopanan, mengindahkan aturan main (*rule of law*), berpikir kritis, dan kemauan untuk mendengar, bernegosiasi dan kompromi.

Civic Disposition yang diinternalisasikan melalui mata pelajaran pendidikan antikorupsi adalah untuk menumbuhkan karakter dan kepribadian yang baik baik secara privat maupun publik sehingga menjadikan warga negara yang cerdas dan berkarakter sikap dan kebiasaan berpikir warga. Adapun indikator yang dapat dijadikan tolak ukur dalam *civic disposition* yaitu:

- 1) Tanggung Jawab
- 2) Disiplin.
- 3) Kepedulian.
- 4) Berpikir Kritis.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Angket

Bungin (2005:133) mengemukakan bahwa angket merupakan serangkaian atau daftar pertanyaan yang disusun secara sistematis, kemudian dikirim untuk diisi oleh responden. Sedangkan Nazir (2014:179) menyatakan bahwa angket adalah sebuah set pertanyaan yang secara logis berhubungan dengan masalah penelitian, dan tiap pertanyaan merupakan jawaban-jawaban yang mempunyai makna dalam menguji hipotesis. Dengan kata lain, angket ialah pertanyaan yang dibuat oleh peneliti yang akan diberikan kepada responden dengan sejumlah pertanyaan yang telah dirancang sebelumnya.

Skala angket dalam penelitian ini menggunakan skala Likert. Sugiyono (2012:136) menyatakan skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang, atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Sedangkan Sarwono (2006:96) mengungkapkan bahwa skala Likert ialah pengaruh atau penolakan, penilaian, suka atau tidak suka, kepositifan atau kenegatifan terhadap suatu obyek.

Peneliti menggunakan teknik ini agar dapat mengumpulkan data secara langsung dari responden. Bentuk angket yang peneliti gunakan

dalam penelitian ini adalah angket tertutup, dimana responden mengisi kuisioner sesuai dengan kolom yang telah disediakan oleh peneliti. Peneliti memilih teknik angket agar lebih memudahkan peneliti dalam mengumpulkan data. Sasaran angket ini yaitu peserta didik di SMK Negeri 1 Bandarlampung Kota Bandarlampung.

2. Tes

Menurut Nurgiyantoro, (2010) tes merupakan sebuah instrumen atau prosedur yang sistematis untuk mengukur suatu sampel tingkah laku. Adapun tes merupakan suatu perangkat rangsangan atau stimulus yang diberikan kepada responden yaitu peserta didik di SMK Negeri 1 Bandar Lampung dengan maksud untuk mendapatkan jawaban yang dapat dijadikan dasar-dasar bagi penetapan skor angka. Metode ini digunakan untuk mendapatkan data tentang pengetahuan peserta didik dalam pembelajaran pendidikan antikorupsi yang telah dipelajari. Metode tes ini dipilih untuk mendapatkan data kemampuan peserta didik dalam memahami, menerapkan dan menganalisis terkait materi yang di tes kan dengan cara memberikan sejumlah butir pertanyaan mengenai pemahaman materi pendidikan antikorupsi yang telah diajarkan sebelumnya. Tes disajikan dalam bentuk pertanyaan berisi butir-butir soal, tes disusun sesuai dengan materi pada pembelajaran ppkn dan berbentuk pilihan ganda.

3. Wawancara

Sugiyono (2012:188) mengemukakan bahwa teknik wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang diteliti. Sedangkan Nazir (2014:170) menyatakan bahwa wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara pewawancara dengan narasumber. Oleh karena itu, wawancara ialah proses pengajuan pertanyaan yang diajukan kepada narasumber untuk mengumpulkan data-data yang mendukung penelitian.

4. Observasi

Menurut Sugiyono (2018:229) observasi merupakan teknik pengumpulan data yang mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain. Observasi juga tidak terbatas pada orang, tetapi juga objek-objek alam yang lain. Sedangkan menurut Yusuf (2013:384) kunci keberhasilan dari observasi sebagai teknik dalam pengumpulan data sangat banyak ditentukan oleh peneliti itu sendiri, karena peneliti melihat dan mendengarkan objek penelitian dan kemudian peneliti menyimpulkan dari apa yang diamati.

F. Instrumen Penelitian

Menurut Arikunto (2013) yang menyatakan bahwa instrumen penelitian adalah alat atau fasilitas yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data penelitian agar pekerjaannya menjadi lebih mudah dan baik, dalam arti lebih cermat, lengkap, dan sistematis sehingga lebih mudah untuk diolah. Dalam hal ini instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan dalam pengumpulan data di dalam sebuah penelitian. Sebagaimana dasarnya adalah melakukan sebuah pengukuran terhadap fenomena sosial atau kenyataan lapangan. Maka dalam penelitian ini perlu menggunakan alat yang berguna untuk menghasilkan data dalam sebuah penelitian. Adapun instrumen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Angket

Dalam hal ini angket digunakan sebagai alat bantu teknik pokok untuk mengumpulkan data berupa sebuah pertanyaan tertulis yang diajukan kepada responden. Data yang didapat dari lembar angket digunakan untuk melihat dan mengetahui informasi yang lengkap mengenai permasalahan pendidikan antikorupsi terhadap penguatan *civic disposition* peserta didik. Pada penelitian ini respondennya adalah peserta didik kelas X di SMK Negeri 1 Bandarlampung. Dalam penyusunan lembar angket peneliti akan menyertakan kisi-kisi lembar angket dan pedoman penskoran yang terdapat pada lampiran.

2. Tes

Tes merupakan sebuah instrumen atau prosedur yang sistematis untuk mengukur suatu sampel tingkah laku. Adapun tes merupakan suatu perangkat rangsangan atau stimulus yang diberikan kepada responden. Tes digunakan untuk mendapatkan data tentang pengetahuan peserta didik dalam pembelajaran pendidikan antikorupsi yang telah dipelajari baik dalam memahami, menerapkan dan menganalisis terkait materi yang di tes kan dengan cara memberikan sejumlah butir pertanyaan mengenai pemahaman materi pendidikan antikorupsi yang telah diajarkan sebelumnya.

3. Wawancara

Instrumen wawancara ini merupakan alat bantu atau pedoman untuk dapat memperoleh dan melengkapai informasi sebanyak-banyaknya terhadap responden mengenai kenyataan yang ada terhadap masalah yang akan diteliti oleh peneliti. Wawancara ini dilakukan untuk melengkapi data dan informasi yang diperoleh melalui adanya angket, yaitu mengenai jalannya pembelajaran pendidikan antikorupsi dan kaitannya dengan penguatan *civic disposition* pada peserta didik. Dalam penelitian ini menggunakan wawancara yang terstruktur, hal tersebut dilakukan agar peneliti dapat menemukan informasi seluas-luasnya mengenai permasalahan dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti yang selanjutnya tercantum dalam lembar kisi-kisi.

4. Observasi

Observasi dalam penelitian ini yaitu dengan melakukan pengamatan langsung di lapangan untuk mengetahui kondisi yang sebenarnya dari peserta didik, baik dalam pembelajaran pendidikan antikorupsi dan implentasinya kehidupan di lingkungan sekolah serta apakah berdampak pada *civic diposition* pada peserta didik.

Peneliti yang memberi makna tentang apa yang diamatinya dalam reliatas dan dalam konteks yang alami, ialah yang bertanya dan juga yang melihat bagaimana hubungan antara satu aspek dengan aspek yang lain pada objek yang ditelitinya.

G. Uji Validitas dan Realibilitas

1. Uji Validitas

Validitas adalah sebuah ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan atau kesahihan suatu instrumen, sedangkan menurut Sarwono (2006) menjelaskan bahwa validitas adalah sebuah skala pengukuran dikatakan valid apabila skala tersebut digunakan untuk mengukur apa yang diukur.

Berdasarkan pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwasanya uji validitas adalah suatu kontrol khusus terhadap teori-teori yang telah menghasilkan indikator variabel yang disesuaikan dengan maksud serta isi dari butir soal yang dilakukan melalui koreksi angket.

Pengujian dilakukan dengan menggunakan uji dua sisi dengan taraf signifikansi 0,05 dengan kriteria pengambilan keputusan yaitu $r_{hitung} \geq r_{tabel}$, maka instrumen dinyatakan valid. Untuk memudahkan uji validitas dalam penelitian ini maka dilakukan dengan teknik *Bivariate Pearson (Produk Momen Pearson)* menggunakan bantuan program Statistical Product and Service Solution (SPSS). Adapun kriteria diterima atau tidaknya suatu data valid atau tidak dalam program SPSS (Prayitno, 2012). Berdasarkan nilai korelasi :

a) Jika $r_{hitung} > r_{tabel}$ maka item dinyatakan valid.

b) Jika $r_{hitung} < r_{tabel}$ maka item dinyatakan tidak valid.

Berdasarkan signifikansi :

a) Jika nilai signifikansi $> \alpha$ (0,05) maka item dinyatakan tidak valid.

b) Jika nilai signifikansi $< \alpha$ (0,05) maka item dinyatakan valid.

Tabel 3. Uji Validitas Instrumen Penelitian

Item-Total Statistics				
	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted

Item_1	87.3500	90.766	0.479	0.772
Item_2	87.2000	86.274	0.474	0.757
Item_3	87.4000	84.253	0.473	0.751
Item_4	87.3500	82.555	0.498	0.746
Item_5	87.6500	82.976	0.469	0.743
Item_6	87.2500	82.408	0.509	0.744
Item_7	86.5500	85.418	0.594	0.747
Item_8	87.8500	82.976	0.476	0.744
Item_9	87.2000	88.800	0.550	0.763
Item_10	87.0000	83.053	0.478	0.746
Item_11	86.6500	82.134	0.572	0.739
Item_12	88.1000	81.779	0.549	0.739
Item_13	87.0000	86.421	0.532	0.754
Item_14	88.1500	81.924	0.550	0.739
Item_15	87.1500	80.345	0.503	0.738
Item_16	87.2000	84.484	0.478	0.751
Item_17	86.6000	85.621	0.469	0.748
Item_18	87.3500	90.029	0.501	0.769
Item_19	87.2500	92.197	0.479	0.774
Item_20	86.9500	85.524	0.542	0.753
Item_21	88.2000	83.958	0.469	0.744
Item_22	87.0500	84.892	0.497	0.751
Item_23	88.0000	83.789	0.526	0.747
Item_24	86.9500	85.524	0.527	0.751
Item_25	87.1000	90.411	0.537	0.769
Item_26	88.1500	83.818	0.484	0.744
Item_27	86.7500	82.092	0.535	0.740
Item_28	86.7500	83.776	0.490	0.745
Item_29	88.1500	83.818	0.494	0.744
Item_30	86.6000	85.621	0.493	0.748
Item_31	86.8000	93.116	0.491	0.773
Item_32	87.4500	80.050	0.528	0.737
Item_33	88.7000	88.537	0.496	0.757
Item_35	88.5500	91.839	0.516	0.766
Item_36	88.5000	89.000	0.537	0.757
Item_37	88.5500	90.155	0.532	0.761
Item_38	88.5000	89.632	0.486	0.759
Item_39	88.9000	88.411	0.473	0.758
Item_40	88.6500	87.187	0.501	0.753
Item_41	88.5500	87.313	0.488	0.752
Item_42	89.0000	89.053	0.544	0.760
Item_43	88.5500	87.418	0.496	0.753
Item_44	88.9000	83.253	0.577	0.742

Item_45	88.6000	87.095	0.543	0.752
Item_46	88.8500	86.766	0.520	0.753
Item_47	88.8500	86.766	0.520	0.753
Item_48	89.0500	92.155	0.536	0.768
Item_49	88.8500	86.555	0.523	0.752
Item_50	88.9000	88.937	0.503	0.759
Item_51	88.6500	86.661	0.470	0.751
Item_52	88.5500	87.945	0.488	0.754
Item_53	88.7000	92.853	0.486	0.769
Item_54	88.9500	84.261	0.484	0.745
Item_55	88.9000	86.832	0.489	0.753
Item_56	89.1500	84.345	0.501	0.745
Item_57	88.7500	85.882	0.520	0.750
Item_58	88.6000	86.253	0.469	0.750
Item_59	88.5000	87.421	0.540	0.752
Item_60	89.1000	87.674	0.507	0.755
Item_61	88.6500	89.082	0.505	0.759
Item_62	88.9000	87.358	0.533	0.755

Tabel diatas menunjukkan hasil uji validitas statistik. Adapun pengambilan kesimpulan dilihat dari kolom *Corrected Item-Total Correlation*. Jika nilai $> R$ tabel yaitu lebih besar dari 0.468 maka item soal valid. Jika nilai $< R$ tabel yaitu lebih kecil dari 0.468 maka item soal tidak valid. Berdasarkan hasil uji diatas semua nilai dari kolom *Corrected Item-Total Correlation* $> R$ tabel maka semua item soal valid.

2. Uji Realibilitas

Menurut Uji validitas reliabilitas merupakan suatu instrumen yang menunjukkan pada sebuah kecukupan dan dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat untuk mengumpulkan data karena instrumen tersebut telah baik. Sedangkan menurut Wibowo (2012) menjelaskan bahwasannya kriteria dari penilaian uji reliabilitas kurang dari 0,6 adalah kurang baik, sedangkan 0,7 dapat diterima dan diatas 0,8 merupakan baik. Beberapa peneliti berpengalaman merekomendasikan dengan cara membandingkan nilai dengan tabel kriteria indeks koefisien pada tabel berikut ini :

Tabel 4. Koefisien Reliabilitas

No.	Nilai Interval	Kriteria
1	< 0,20	Sangat Rendah
2	0,20 – 0,399	Rendah
3	0,40 – 0,599	Cukup
4	0,60 – 0,799	Tinggi
5	0,80 – 1,00	Sangat Tinggi

Sumber : Data hasil penelitian Wibowo (2012)

Selain itu, nilai reliabilitas dapat dicari dengan membandingkan nilai *cronbach's alpha* pada perhitungan SPSS dengan nilai r tabel menggunakan uji satu sisi pada taraf signifikansi 0,05 (SPSS secara default menggunakan nilai ini) dan $df = N - 2$, N adalah banyaknya sampel dan K adalah jumlah variabel yang diteliti, kriteria reliabilitasnya yaitu (Wibowo, 2012) :

- a) Jika $r_{hitung} (r_{alpha}) > r_{tabel}$ maka butir pertanyaan/pernyataan tersebut reliabel.
- b) Jika $r_{hitung} (r_{alpha}) < r_{tabel}$ maka butir pertanyaan/pernyataan tersebut tidak reliabel.

Adapun langkah-langkah analisis data untuk menguji reliabilitas dilakukan dengan program SPSS adalah sebagai berikut :

- a) Menghitung jumlah skor jawaban responden tiap item pertanyaan/pernyataan, dalam hal ini skor total tidak diikutsertakan. Melakukan analisis menggunakan perintah *analyze* kemudian *scale reliability analysis*.
- b) Membandingkan nilai *cronbach's alpha* dengan r_{tabel} .

Tabel 5. Uji Realibilitas

Reliability Statistics		
Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
0.756	0.764	61

Tabel diatas menunjukkan hasil uji Reliabelitas dilihat dari nilai *Cronbach's Alpha* yaitu sebesar 0.756 artinya memiliki nilai Reliabel yang tinggi.

H. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengubah hasil data dari penelitian menjadi sebuah informasi baru yang dapat digunakan untuk membuat suatu kesimpulan. Analisis data juga bertujuan untuk menyederhanakan suatu informasi baru yang nantinya akan lebih mudah untuk dipahami. Analisis data pada penelitian ini akan dilakukan adalah uji prasyarat analisis dan analisis akhir atau uji hipotesis.

1. Analisis Distribusi Frekuensi

Analisis distribusi frekuensi dilakukan untuk mengetahui klasifikasi beserta persentase tingkat pengaruh pendidikan antikorupsi terhadap penguatan *civic disposition* peserta didik di SMK Negeri 1 Bandarlampung. Analisis distribusi frekuensi menggunakan rumus interval yang dikemukakan oleh Hadi (2021:) dengan persamaan berikut:

$$I = \frac{NT - NR}{K}$$

Keterangan:

I = Interval

NT = Nilai tertinggi

NR = Nilai terendah

K = Kategori

Selanjutnya untuk mengetahui tingkat presentase digunakan rumus presentase sebagai berikut:

$$P = \frac{F}{N} \times 100\%$$

Keterangan:

P = Besarnya persentase

F = Jumlah skor yang diperoleh diseluruh item

N = Jumlah perkalian seluruh item dengan responden

Selanjutnya untuk mengetahui banyaknya presentase yang diperoleh maka digunakan dengan kriteria yang ditafsirkan sebagai berikut:

76% - 100 % = Baik

56% - 75% = Cukup

40% - 55% = Kurang baik

0% - 39% = Tidak baik

(Suharsimi Arikunto, 2010: 196).

2. Uji Prasyarat

a. Uji Normalitas

Uji Normalitas adalah percobaan untuk mengetahui apakah data sampel berdistribusi normal atau tidak. Dalam penelitian ini dilakukan dengan uji kolmogrov smirnov, karena sampel yang digunakan merupakan mempunyai skala yang besar ≥ 50 . Pedoman dalam pengambilan hasil akhir menggunakan uji kolmogrov adalah jika nilai Sig. atau probilitas (p) $\geq 0,05$ data bertribusi normal dan jika nilai Sig. atau probilitas (p) $\leq 0,05$ data bertribusi tidak normal. Hal ini dilakukan untuk menentukan data statistik yang digunakan. Jika data berdistribusi normal dapat digunakan metode statistik parametrik, sedangkan jika data tidak bertribusi tidak normal maka dapat menggunakan metode nonparametrik (Sugiyono, 2007:75).

b. Uji Linier

Uji linieritas bertujuan untuk mengetahui apakah Pengaruh Pendidikan Antikorupsi (Variabel X) dan Penguatan *Civic Disposition* (Variabel Y) mempunyai hubungan yang linier atau

tidak secara signifikan. Menurut Priyatno (2008) uji ini biasanya digunakan sebagai uji prasyarat dalam analisis korelasi atau regresi linier. Pengujian pada SPSS dengan menggunakan *Test For Liniarty* pada taraf sig 0,05 dan dua variabel dapat dikatakan mempunyai hubungan apabila signifikansi linier kurang dari 0,05.

3. Uji Regresi Sederhana

Selanjutnya dalam penelitian ini akan diujikan menggunakan rumus regresi linier. Untuk mempermudah dalam uji lineritas maka pada penelitian ini menggunakan daftar analisis varian (anova) dengan ketentuan apabila $F \text{ hitung} \leq F \text{ tabel}$ pada taraf 5% dengan dk pembilang (k-2) dan dk penyebut (n-k), maka regresi linier.

Data hasil dari analisis regresi ini digunakan untuk melihat pengaruh antara variabel X terhadap variabel Y, yaitu pengaruh Pendidikan Antikorupsi (X) terhadap Penguatan *Civic Disposition* (Y). Adapun persamaan dari regresi linier adalah sebagai berikut:

$$\bar{Y} = a + bX$$

Keterangan :

Y = Subyek pada variabel dependent

X = Prediktor

a = Harga Y ketika harga X = 0 (Harga Konstanta)

b = Koefisien regresi

(Sugiyono, 2013)

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis data, pembahasan hasil penelitian, khususnya analisis data yang telah diuraikan mengenai Pengaruh Pendidikan Antikorupsi Terhadap Penguatan *Civic Disposition* Peserta Didik Di SMK Negeri 1 Bandarlampung, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa:

1. Dengan nilai koefisien determinasi yang diperoleh yaitu sebesar 0,407 yang merupakan representasi dari pengaruh pendidikan antikorupsi, artinya pengaruh pendidikan antikorupsi dalam meningkatkan *civic disposition* di peroleh nilainya sebesar 40,7%, dan sisanya dipengaruhi dari faktor lain. Pendidikan antikorupsi tentu memiliki pengaruh yang cukup tinggi dalam meningkatkan *civic disposition* walaupun sembilan nilai antikorupsi juga diajarkan ke peserta didik melalui mata pelajaran lain, namun secara muatan materi dan konteks dalam pembelajarannya berbeda. Peningkatan *civic disposition* peserta didik dapat dilihat dari indikator penelitian yang terdiri dari tanggung jawab, disiplin, kepedulian dan berpikir kritis yang nilai-nilai tersebut diajarkan lebih fokus dalam pembelajaran pendidikan antikorupsi sehingga dapat mewujudkan kehidupan yang berintegritas baik secara privat maupun publik sejalan dengan pendidikan antikorupsi yang harus ditanamkan kepada peserta didik.

B. Saran

Setelah penulis menyelesaikan penelitian, pembahasan dan menarik kesimpulan dari hasil penelitian, maka penulis ingin memberikan saran sebagai berikut:

1. Sekolah

Kepada pihak sekolah SMK Negeri 1 Bandarlampung diharapkan dapat memberikan fasilitas yang lebih lengkap untuk mendukung proses pembelajaran yang lebih kreatif dan inovatif dan juga mengontrol para guru dan peserta didik dalam proses pembelajaran sehingga bisa memaksimalkan upaya pembelajaran pendidikan antikorupsi untuk peningkatan *civic disposition* pada peserta didik.

2. Guru

Kepada guru diharapkan mampu memberikan pemahaman dan komponen-komponen pembelajaran yang dipakai untuk lebih kreatif dan inovatif sehingga tidak menyebabkan pembelajaran menjadi monoton yang mengakibatkan siswa menjadi kurang paham dalam memahami materi dan memberikan contoh bagaimana mengamalkan nilai-nilai antikorupsi yang baik dan penerapan *civic disposition* di kehidupan sehari-hari.

3. Siswa

Siswa diharapkan untuk berani dalam mengemukakan pendapat, aktif dalam berorganisasi dan ikut serta dalam ekstrakurikuler disekolah, dan dapat mengamalkan nilai-nilai antikorupsi sehingga dapat meningkatkan *civic disposition* pada diri sendiri.

4. Peneliti Selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini bisa digunakan untuk perbandingan dan referensi untuk penelitian, dan sebagai bahan pertimbangan untuk lebih memperdalam penelitian selanjutnya dengan menggunakan indikator lain dari variabel yang digunakan dalam penelitian ini sehingga dapat mengukur dengan lebih jelas pengaruh pendidikan antikorupsi terhadap penguatan *civic disposition peserta didik*. Peneliti menyarankan apabila peneliti yang selanjutnya ingin meneliti variabel yang sama hendaknya memakai indikator pada variabel yang lebih menunjang sehingga akan didapatkan hasil yang lebih maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Wibowo. (2013). Pendidikan Antikorupsi Di Sekolah: Strategi Internalisasi Pendidikan Antikorupsi Di Sekolah. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Anggriani, G. D. (2019). PERAN GURU PPKN DALAM MENANAMKAN NILAI DAN SIKAP ANTI KORUPSI (Studi Kasus Peserta Didik Kelas XI di SMA Pasundan 3 Bandung) (Doctoral dissertation, FKIP UNPAS).
- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Arikunto. S. 2013. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Aryani, A. (2011). Hubungan Antara Pemahaman Korupsi Dengan Sikap Anti Korupsi Pada Siswa Kelas Viii Smp Negeri 1 Lakbok Kabupaten Ciamis, Jawa Barat Tahun Ajaran 2010-2011.
- Aziz, F., Nurjanah, F., & Sari, D. P. (2017). Aktualisasi TTB (Teori Taksonomi Bloom) Melalui Drama Kepahlawanan Guna Penanaman Pendidikan Karakter Pada Peserta Didik. FKIP e-PROCEEDING, 715-724.
- Biyanto, B. (2010). Pemberantasan korupsi dan perwujudan integritas publik dalam perspektif Muhammadiyah dan NU. *Jurnal Penelitian Keislaman*, 7(1), 29-56.
- Branson, M. 1998. *The Role Of Civic Education*. Center For Civic Education.
- Bungin, Burhan. 2005. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: Prenamedia Group.
- Chaibullah, W. (2011). *Memberantas Korupsi dari Dalam Diri*, Jakarta : Publishing House.
- Cholisin. 2010. Penerapan Civic skills dan Civic disposition Dalam Mata Kuliah Prodi PPKn. Diskusi Terbatas Jurusan PKn dan Hukum FISE, Universitas Negeri Yogyakarta.
- Diarsih, Kadek. 2015. Pengaruh Partisipasi Pada Kegiatan Organisasi Siswa Intra Sekolah Terhadap Sikap Demokratis Siswa. *Jurnal Kultur Demokrasi*. Vol 3. No 4.
- Dwi Siswoyo, dkk. 2007. *Ilmu Pendidikan*. Yogyakarta: UNY Press.
- Dwi Siswoyo, dkk.(2008). *Ilmu Pendidikan*. Yogyakarta : UNY Press

- Hadi Ismanto, S. E., & Pebruary, S. (2021). Aplikasi SPSS dan Eviews dalam analisis data penelitian. Deepublish.
- Hidayati, Eka Sutriana. (2013). Implementasi Pendidikan Antikorupsi Dalam Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Di Smp Se-Kabupaten Sleman. (Skripsi Sarjana, Universitas Persada).
<https://eprints.uny.ac.id/23757/>.
- Kesuma, Dharma; Darmawan, Cecep; dan Permana, Johar. (2009). Korupsi dan Pendidikan Anti Korupsi. Bandung: Pustaka Aulia Press
- Koesoemo, A. T., & Bawole, T. S. G. Y. (2017). Urgensi Pendidikan Anti Korupsi Bagi Pelajar dan Mahasiswa di Kota Manado. LEX ET SOCIETATIS, 5(8).
- Kristiono, N. (2018). Penanaman karakter anti korupsi melalui mata kuliah pendidikan anti korupsi bagi mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang. Jurnal Hibualamo: Seri Ilmu-Ilmu Sosial Dan Kependidikan, 2(2), 51-56.
- Malatuny, Y. G., & Rahmat, R. (2017). Pembelajaran Civic Education Dalam Mengembangkan Civic Disposition. PEDAGOGIKA: Jurnal Pedagogik dan Dinamika Pendidikan, 5(1), 56-68.
- Martono, Nanang. 2016. Metode Penelitian Kuantitatif. Jakarta: Rajawali Pers.
- Mulyono, B. (2017). Reorientasi civic disposition dalam kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan sebagai upaya membentuk warga negara yang ideal. Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan, 14(2), 218.
- Nazir, Moh. 2014. Metode Penelitian. Bogor: Ghalia Indonesia.
- NISSA, A. J. (2020). Penanaman Kompetensi Kewarganegaraan Melalui Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Terhadap Siswa Di Min 3 Tulungagung. Sarwono, Jonathan. 2006. Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Nurmalisa, Y., Yanzi, H., & Putri, D. S. (2022). Sosialisasi pendidikan anti korupsi yang berintegritas di SMK Negeri 02 Mei Bandar Lampung. Jurnal Sumbangsih, 3(2), 130-135.
- Pendidikan Anti Korupsi Di Provinsi Lampung
- Peraturan Gubernur Lampung No. 35 Tahun 2019 Tentang Implementasi
- Priyatno, Duwi. 2008. Mandiri Belajar SPSS Untuk Analisis dan Uji Statistik. Yogyakarta: Media Kom.
- Putra, I. A., Darmawan, C., & Syam, S. (2018). Polaasuh Otoriter-Demokratis Dalam Menanamkan Pendidikan Anti Korupsi. Sosietas, 8(1).

- Quigley, C. N., & Bahmueller, C. 1991. *Civitas: A Framework for Civic Education*. NCSS Publications, c/o Maxway Data Corp., Suite 1105, 225 West 34th Street, New York, NY 10001.
- Raharja, Reza Mauldy dkk. 2017. Pengaruh Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Terhadap Kompetensi Warga Negara Mahasiswa FKIP. *Jurnal Untirta Civic Education*, Vol.2 No.1
- Rusdini, S.E., Rachman, M. & Handoyo, E. (2016). Pelaksanaan Internalisasi Kejujuran Dalam Pendidikan Antikorupsi di SMP Keluarga Kudus. *Journal of Educational Social Studies*. 5 (1). Hlm. 24-32
- Saronji Dahlan. 2006. *Pendidikan Kewarganegaraan Untuk SMP Kelas VIII*. Jakarta: Erlangga
- Siaran Pers BKLM, Nomor: 261/Sipres/A5.3/HM/XII/2018
- Sugiyono. 2007. *Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kombinasi*. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. 2013. *Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Tentang Implementasi Pendidikan Karakter dan Budaya Antikorupsi pada Satuan Pendidikan Nomor: 420/4047/SJ, dan Nomor: 420/4048/SJ, 20 Mei 2019
- Umar, H. (2012). Pengawasan untuk pemberantasan korupsi. *Jurnal Akuntansi dan auditing*, 8(2), 109-122.
- Undang-Undang no 19 Tahun 2019 tentang komisi pemberantasan tindak pidana korupsi
- Undang-Undang no. 20 Tahun 2003 tentang pendidikan
- Wibowo. 2012. *Manajemen Kinerja*. Jakarta: Rajawali Pers
- Winarno. 2014. *Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan: Isi, Strategi dan Penilaian*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Witman Syahroni. Pengaruh Penggunaan Buku Teks Berbasis Nilai Sebagai Sumber Belajar Pendidikan Kewarganegaraan Terhadap Sikap Kewarganegaraan (Civic Disposition), (Jakarta : Universitas Pendidikan Indonesia, 2016), hal.